

PEMERINTAH KABUPATEN BONE



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018, LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

Cakupan LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 terdiri atas Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator kinerja utama, terdapat 3 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 25 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE


Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19650915 198603 1 018

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	4
Gambaran Umum Organisasi.....	5
Struktur Organisasi.....	6
Isus Strategis.....	9
Inovasi Pelayanan Publik.....	10
Sistem Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
Rencana Strategis	13
Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	16
Indikator Kinerja Utama.....	17
Rencana Anggaran Tahun 2018.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
Capaian Kinerja Organisasi	24
Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019	
Matrix Kinerja Tahun 2018	
Rencana Aksi Tahun 2018	
Tahapan dan Pengukuran Kinerja Tahun 2018	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi BPKAD Kab. Bone Tahun 2018.....	6
Gambar 2 Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra BPKAD...	15
Tabel 2.2 Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra BPKAD...	15
Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018.....	16
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2018.....	16
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Esalon III BPKAD Tahun 2018.....	17
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama BPKAD.....	18
Tabel 2.7 IKU dan Target Setiap Tahun.....	18
Tabel 2.8 Belanja BPKAD Tahun 2018.....	18
Tabel 2.9 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018.....	19
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Kinerja BPKAD.....	25
Tabel 3.2 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018.....	26
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tercapaiannya Kenaikan Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah yang Profesional.....	27
Tabel 3.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tercapaiannya Kenaikan Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Aset Daerah yang profesional.....	27
Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran Tercapaiannya Kenaikan Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Aset Daerah yang Profesional.....	30
Tabel 3.6 Analisis tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran Tercapaiannya Kenaikan Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Aset Daerah yang Profesional.....	30
Tabel 3.7 Keterkaitan Program terhadap Capaian Indikator Sasaran Tercapaiannya Kenaikan Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Aset Daerah yang Profesional.....	32
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	33
Tabel 3.9 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	34
Tabel 3.10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	40
Tabel 3.11 Analisis tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	40
Tabel 3.12 Keterkaitan Program terhadap Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	43
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.....	45
Tabel 3.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.....	46
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	47
Tabel 3.16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.....	48

Tabel 3.17 Tingkat Efesiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah..... 49

Tabel 3.18 Keterkaitan Program terhadap Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah..... 49

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Langsung BPKAD
Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 dengan Tahun
Sebelumnya..... 51

Tabel 3.20 Target dan Realisasi APBD Tahun 2013 s/d 2018..... 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang- undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun

2018 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Bone. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2013-2018. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

LKjIP ini merupakan bentuk formal pertanggung jawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang bermanfaat untuk :

- a. Mewujudkan rumusan kebijakan perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang terpadu dan realistis.
- b. Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan baik yang bersifat kewilayahan maupun sektoral.
- c. Menyerahkan kegiatan pengelolaan keuangan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- d. Mewujudkan keseimbangan keuangan antar wilayah dan sektor sesuai dengan unit kerjanya.
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan

yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah

Dalam Pemerintah Kabupaten Bone peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, sangat vital sekali yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone.

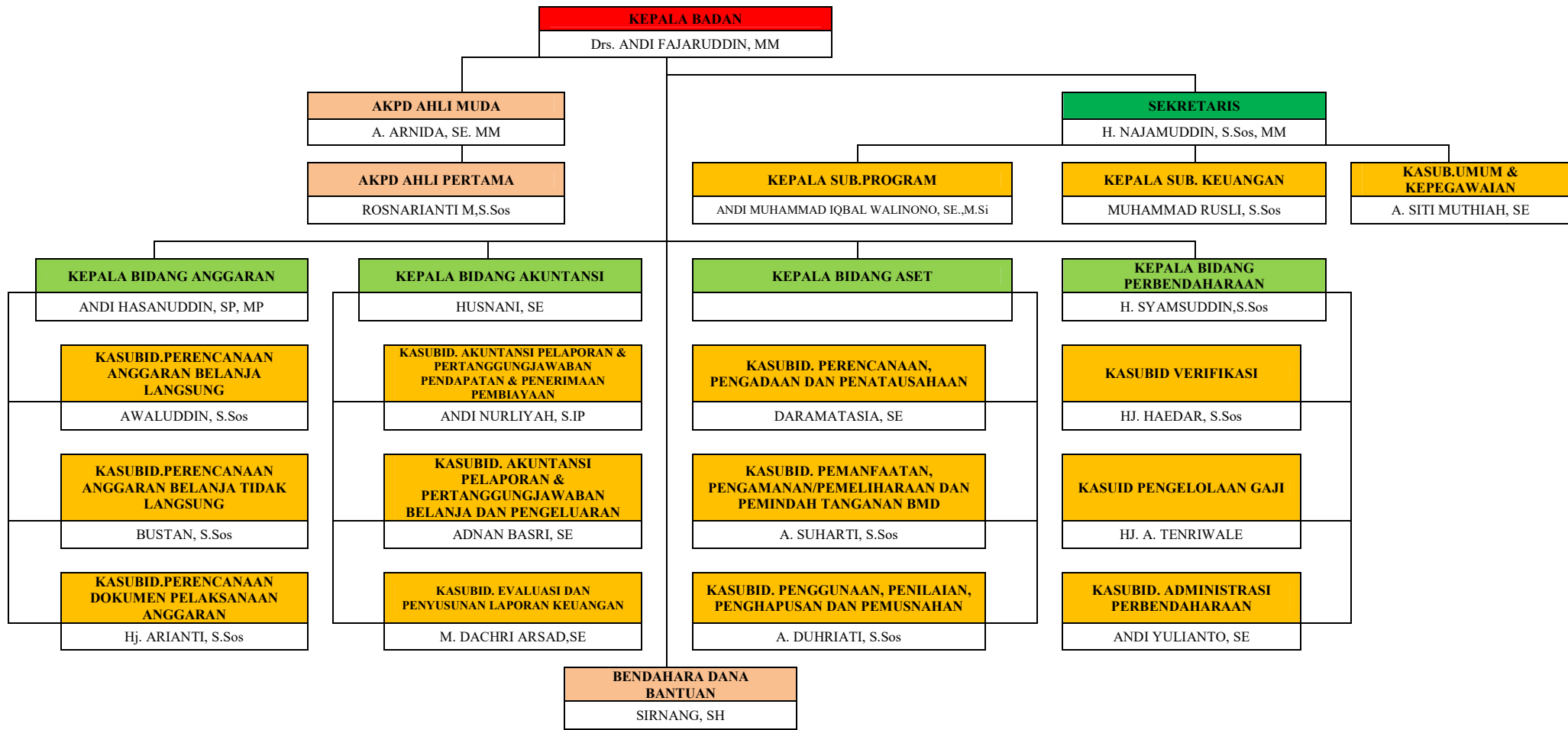
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Gambar 1.1



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki susunan organisasi sebagai berikut terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
- c. Kepala bidang Anggaran
- d. Kepala bidang Akuntansi
- e. Kepala Bidang Perbendaharaan
- f. Kepala Bidang Aset

Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

Tugas : Memimpin organisasi dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Fungsi :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
- Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Melaksanakan fungsi BUD
- Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-SKPD
- Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran SKPD
- Menetapkan SPD;
- Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah
- Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- Menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris

Tugas :Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;

Fungsi :

- Pengordinasian penyusunan rencana, program, dan kegiatan dilingkungan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah;

- Pengordinasian Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- Pembinaan rusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan Negara;
- Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Bidang Anggaran

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penganggaran daerah dengan mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan program dan kegiatan SKPD sesuai tugas dan tanggung jawabnya

Fungsi:

- Merumuskan kebijakan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- Merumuskan kebijakan pelaksanaan APBD dan APBD-P
- Menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Akuntansi

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang akuntansi, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, menyusun pedoman dari petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Fungsi :

- Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program bidang akuntansi
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan pada SKPD;
- Pelaksanaan pembinaan dan bimtek akuntansi pemerintahan serta regulasi keuangan lainnya
- Penyusunan Laporan keuangan Pemerintahan Daerah
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Aset

Tugas : Membantu kepala Badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Aset yang menjadi tanggung jawab

Fungsi :

- Perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penatausahaan, penggunaan, penilaian, pemanfaatan, pengamanan/pemeliharaan, pemindatanganan. Penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah (BMD); dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Perbendaharaan

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang perbendaharaan, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, pembinaan kebendaharaan, mengusulkan penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD serta melakukan penagihan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Fungsi :

- Pengumpulan, pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- Pengujian kebenaran daftar penguji atas penertiban surat perintah membayar dari SKPD
- Pemberian pertimbangan serta mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi;
- Pelaksanaan sistem penggajian, pelaporan data data PNS yang efektif dan efisiensi;
- Pelaksanaan Koordinasi penerimaan daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

1. Pengelolaan Aset belum optimal
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan.

3. Belum optimalnya pemahaman aparaturnya dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Adanya beberapa SKPD yang belum tertib penatausahaan Aset
2. Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan tentang pengelolaan keuangan.
3. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi informasi.

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Sejak tahun 2007 sampai 2015 BPKAD menggunakan Sistem Aplikasi yang berbasis offline dalam penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan, tahun 2016 sistem penganggaran dan penatausahaan keuangan sudah berbasis semi online, namun belum terintegrasi antara BPKAD dan SKPD, namun sebagian SKPD sudah menggunakan ekspor impor data atau sistem upload download untuk pengiriman data. Beberapa permasalahan tersebut yaitu kurangnya efektifitas penyusunan APBD, kurang sinkronnya perencanaan dan penganggaran, penyelesaian aset, pengadaan barang dan Jasa, dan daya serap anggaran yang kecil, selain itu juga diperkuat dengan kurangnya akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Permasalahan tersebut pada dasarnya berkaitan antara lain dengan permasalahan Infrastruktur yang kurang memadai, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem *Informasi Taro Ada Taro Gau* (SITATU) yaitu aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan dan pelaporan aset SKPD yang dipergunakan sebagai alat bantu SKPD untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Aplikasi terintegrasi tersebut terus dikembangkan untuk mempermudah dan meperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kab. Bone, dan yang kedua yaitu Sistem Informasi Bendahara Umum Daerah (SIBUNDA), aplikasi yang berbasis digital untuk menampilkan informasi proses pelayanan Bendahara Umum Daerah. Aplikasi

tersebut dikembangkan untuk mempermudah mengetahui jalannya proses pelayanan pada Bendahara Umum Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bone.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi aspek strategis serta struktur organisasi

2. Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2018

3. Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan Pencapaian kinerja Tahun 2018 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2018

4. Bab IV : PENUTUP

Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar 2.1
Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone 2013-2018 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2013-2018 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone 2013-2018 adalah ***Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera***. Visi ini dijabarkan dalam Misi Bupati yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
6. **Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.**

Berkaitan dengan misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, akan menjalankan program dan kegiatan sebagaimana misi **6** yaitu ***Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN***. Implikasi misi pada BPKAD adalah penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif dan akuntabel sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, harus tetap mengacu kepada Visi Kabupaten Bone tahun 2013-2018 yaitu ***“TERWUJUDNYA INSTITUSI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL”***. Frase dari visi ini adalah :

1. Bersih

Bersih adalah aparatur BPKAD yang mentaati azas-azas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

2. Transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang dianut oleh BPKAD dalam mempertanggungjawabkan penyusunan anggaran maupun pertanggungjawaban keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan

akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan BPKAD dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban sebagai institusi sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan mempertahankan opini WTP yaitu Laporan Keuangan (LK) yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Misi adalah identifikasi tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan visi yang telah ditetapkan, sehingga rumusan misi merupakan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Adapun rumusan dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP
3. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

2.1.2 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi antara lain sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Misi 1: | Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. |
| Tujuan: | Meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. |
| Misi 2: | Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP |
| Tujuan: | Mempertahankan opini WTP. |
| Misi 3: | Mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. |
| Tujuan: | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. |

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra BPKAD

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase aset dan barang daerah yang terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	%	39 % Hasil inventarisasi Aset belum mencerminkan keadaan fisik di lapangan	Kesesuaian pencatatan aset daerah dengan keadaan fisik di lapangan 100%
Mempertahankan opini WTP	Persentase penyajian laporan keuangan daerah secara wajar sesuai SAP	%	65%	100%
	Persentase penyajian laporan barang milik daerah secara benar	%	59%	100%
Meningkatkan pendapatan Asli daerah	Persentase PAD dengan Pendapatan	%	5%	15%

2.1.3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran : Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional.

Tujuan 2 : Mempertahankan opini WTP.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tujuan 3 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.2. Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra BPKAD

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional	Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola	Rupiah	2,314,514,943,740	4,100,304,408,247
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah	Opini	WDP	WTP
Meningkatnya PAD	Trend kenaikan PAD 15%/tahun.	%	52,347,658,040	75% 209.400.000.000

2.1.4 Program untuk pencapaian sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Informasi
Meningkatnya PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra 2013-2018, Rencana Kerja (RENJA) 2018, IKU dan APBD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional	Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola	Rupiah	4,100,304,408,247
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah	Opini	WTP
Meningkatnya PAD	Trend kenaikan PAD 15%/tahun	%	75%

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Esalon III Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

Program	Indikator	Satuan	Target
Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur	%	97%
Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kualitas Kinerja Aparatur	%	90%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik	%	80%
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan	%	29,61%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu	%	90%
Penigkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit	%	97,30%
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran belanja	%	95%
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Waktu	Tepat Waktu
	Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrual	%	86,67%
	Penetapan Perda/Perkada tentang Pertanggungjawaban APBD	Waktu	Tepat Waktu
	Persentase penyajian Laporan Barang Milik daerah secara benar	%	72,73%
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH	Presentae Pengembalian atas Kerugian Negara	%	95,00%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.6. IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional	Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola	Rupiah	Jumlah dan nilai aset daerah yang dikelola	Laporan tahunan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah	Opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap lapran keuangan pemerintah daerah	Laporan tahunan
Meningkatnya PAD	Trend kenaikan PAD 15%/tahun.	%	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah PAD Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	Laporan triwulan dan tahunan

Tabel 2.7. IKU dan target setiap tahunnya

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPMJD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Tercapainya Opini WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		39%	15%	30%	45%	60%	75%	75%
2	Trend Kenaikan PAD 15 % per Tahun	85.874.602.728	98.755.793.137	113.569.162.108	130.604.536.424	150.195.216.888	209.400.000.000	209.400.000.000
3	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	2.545.966.438.114	2.800.563.081.925	3.080.619.390.118	3.388.681.329.130	3.727.549.462.043	4.100.304.408.247	4.100.304.408.247

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.62.345.441.628,57,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	24.195.441.628.57	38.81
2	Belanja Langsung	38.150.000.000.00	61.19
	JUMLAH	62.345.441.628.57	100.00

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Alokasi perSasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR KENERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional	Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola	Pelayanan Administrasi Perkantoran		26.434.106.300	80.33%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.271.200.000	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	675.456.948	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	284.467.902	
			Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	845.000.000	
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	2.020.052.450	
			Kegiatan Pengelolaan Gaji	337.929.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4.210.600.000	
			Pembangunan Gedung Kantor	50.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.864.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	67.500.000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	245.000.000	
			Pengadaan Mebeleur	87.500.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	73.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	277.500.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Disiplin Aparatur		44.000.000	19.26%
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	44.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		289.000.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	
			Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	200.000.000	
			Sosialisasi Pajak	49.000.000	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		601.914.100	

SASARAN	INDIKATOR KENERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.095.050	
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	44.280.000	
			Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pembangunan Ekonomi	56.685.000	
			Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat PertanggungJawaban	343.349.800	
			Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	72.504.250	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		275.880.100	
			Peningkatan Pelaksanaan Dana Kas Daerah Oleh BUD	275.880.100	
		Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa		39.314.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	39.314.000	
		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		236.244.500	
			Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	236.244.500	
		Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		5.862.691.000	
			Penyusunan Standar Satuan Harga	125.202.500	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	174.835.000	
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	151.437.100	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	203.250.000	
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	208.762.500	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	250.865.200	
			Tentang Penyusunan Rancangan KDH Tentang Penjabaran PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	162.816.000	

SASARAN	INDIKATOR KENERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
			Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	257.634.000	
			Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keunagan Daerah	338.321.750	
			Peningkatan Manajemen ASET/Barang Daerah	406.194.000	
			Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	311.626.000	
			Pengamanan Aset Daerah	171.134.500	
			Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota keuangan APBD	111.072.500	
			Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	91.810.000	
			Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	132.041.900	
			Penyusutan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	60.868.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	97.290.000	
			Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	139.572.750	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019	157.740.000	
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun 2019	135.420.000	
			Penilaian Barang Milik Daerah	134.980.250	
			Peningkatan Pengelolaan,Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah	431.890.000	
			Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan keuangan	37.500.000	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal	90.198.000	
			Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	320.972.750	
			Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	389.600.000	

SASARAN	INDIKATOR KENERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
			Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	389.953.800	
			Pembinaan dan Pengelolaan penyusunan Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	200.480.000	
			Pelaporan Aset	179.222.500	
Meningkatnya PAD	Trend kenaikan PAD 15%/tahun.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		156.250.000	0,41%
		-	Peningkatan Pelaksanaan TGR	156.250.000	
JUMLAH				38.150.000.000	100,00%

Pada tabel diatas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar **Rp.38.150.000.000,-** dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional dengan besaran **80.33%** dikarenakan adanya program administrasi perkantoran dengan indikator kegiatan pembiayaan belanja listrik pemerintah daerah yang menyerap anggaran sekitar **75%** untuk membiayai beban pemakaian listrik pemerintah kabupaten bone selama 1 tahun. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu sebesar **19.2%**, dan sementara sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya PAD sebesar **0.46%** dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Bone nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja BPKAD pada tahun 2018 dan Rencana Strategis Tahun 2013-2018.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017, tahun 2016, tahun 2015, tahun 2014, dan 2013;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu tahun 2013-2018;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai capaian kinerja sasaran. Analisis efisiensi bertujuan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input (anggaran) yang dikeluarkan untuk mencapai output (kinerja) maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Sementara semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran maka tingkat efisiensi semakin rendah.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0;
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran
4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- > 100 = Baik Sekali
- 76 s/d 100 = Baik
- 66 s/d < 75 = Cukup
- 51 s/d < 65 = Kurang
- < 55 = Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Bone. IKU BPKAD Kab. Bone digunakan sebagai ukuran keberhasilan BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama dan 13 indikator kinerja. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional	Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola	4.100.304.408.247	3.905.950.216.246	95,26%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas Audite laporan pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	100
3	Meningkatnya PAD	Trend kenaikan PAD 15%/tahun.	75% 209.400.000.000	75,56% 214.213.155.000	101%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama “Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola” dapat terealisasi Rp.3.905.950.216.246, sehingga ketercapaian target kinerja dari indikator sasaran strategis kesatu yaitu 95.26%, dan capaian Indikator Kinerja Utama “Opini BPK atas Audite Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah” dapat terealisasi Wajar Tanpa Pengecualian atas Audite Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2017, sehingga ketercapaian target kinerja dari indikator sasaran strategis kedua yaitu 100%, serta capaian Indikator Kinerja Utama “Trend kenaikan PAD 15%/tahun” dapat terealisasi Rp.214.213.155.000,- sehingga ketercapaian target kinerja dari indikator sasaran strategis ketiga yaitu 101%

Dari tiga sasaran dengan tiga indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase (%)
Sasaran 1	Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan keuangan aset daerah yang profesional		
1	Baik Sekali		
2	Baik	1	95,26%
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah	1	95,26%
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan aset daerah		
1	Baik Sekali		
2	Baik	1	100,00%
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah	1	100,00%
Sasaran 3	Meningkatnya PAD		
1	Baik Sekali	1	100,75%
2	Baik		
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah	1	100,75%

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap tiga sasaran dengan tiga indikator kinerja, diketahui bahwa satu indikator sasaran 100.75% atau **Baik Sekali**, dua indikator sasaran 100% dan 95.26% atau **Baik**.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama RPJMD dan instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

A. Sasaran 1 : Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional.

- Strategi:
Memperbaiki manajemen aset, perbaikan kinerja pengelolaan aset.
- Kebijakan :
Meningkatkan manajemen dan pengelolaan aset.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Pertama

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tercapainya Kenaikan Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Aset Daerah yang Professional

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional	Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola	4.100.304.408.247	3.905.950.216.246	95,26
Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	95%	95%	100,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	97%	97%	100,00
Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kualitas Kinerja Aparatur	90%	89%	98,89
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik	100%	100%	100,00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan	29,61%	29,02%	98,01

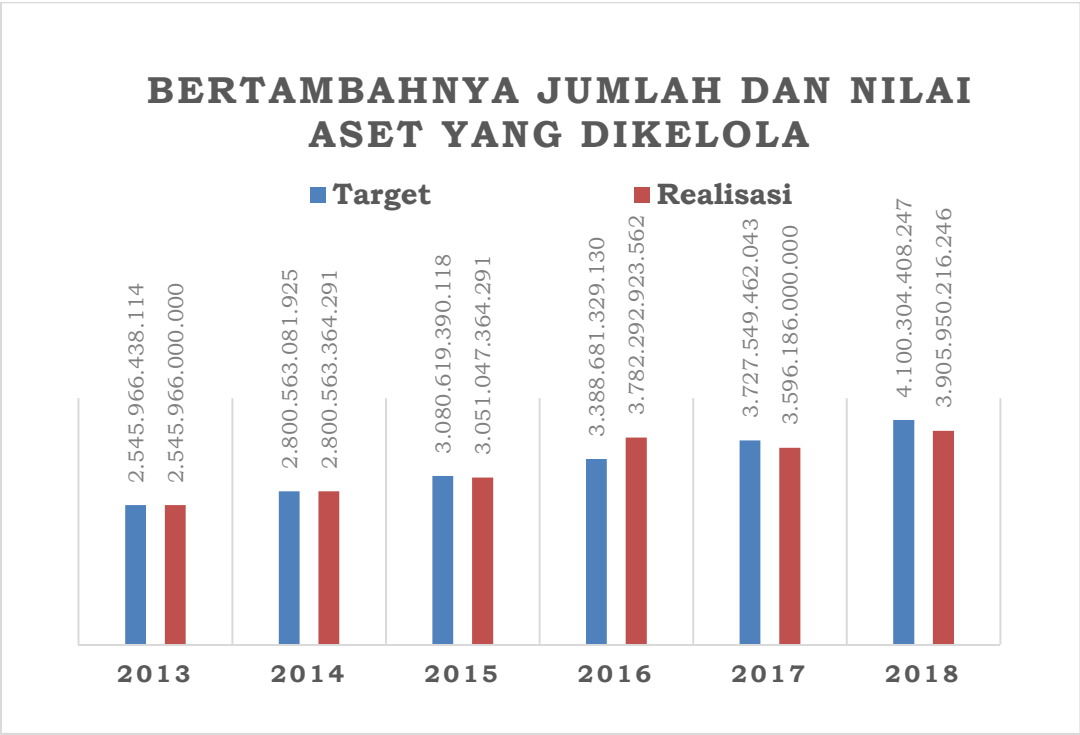
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu bertambahnya jumlah nilai aset yang dikelola dengan capaian **95.26% (kurang dari target)** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai Rp.3.905.950.216.246,- dari target Rp.4.100.304.408.247,- dengan persentase **95.26%** Capaian ini dikategorikan **(Baik)**. Begitu pula capaian terhadap indikator program penunjang sasaran tersebut mencapai rata-rata 99.38% atau dikategorikan **(Baik)**

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya Sasaran Pertama

Tabel 3.4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola	99.90%	99.53%	99.04%	111.62%	96.48%	95.26%
	2.545.966.000.000	2.800.563.364.291	3.051.047.364.291	3.782.292.923.562	3.596.186.000.000	3.905.950.216.246

Grafik 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional



Realisasi pada tahun 2018 mencapai 95.26% dari target Rp.4.100.304.408.247, mengalami penurunan dari tahun 2017 yang mencapai 96.48% dari target Rp. 3.727.549.462.043,-, realisasi tahun 2016 merupakan capaian yang sangat tinggi selama priode 2013-2018 yaitu mencapai 111.62% dari target Rp.3.388.681.329.1301- mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang mencapai 99.04% dari target Rp. 3.080.619.390.118,-.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bone. Oleh sebab itu BPKAD Kab. Bone harus mampu melakukan penatausahaan aset daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah kemudian menjadi semakin penting ketika Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan, yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang Milik Daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (Neraca), yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Peningkatan manajemen aset meliputi : penertiban, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah mendorong percepatan penguatan APBD termasuk perencanaan penerimaan dan pendapatan daerah (PAD). Penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendorong pencapaian pemberian opini/pendapat pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dari pemanfaatan aset daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi:

- 1) pengamanan fisik,
- 2) pengamanan administratif dan
- 3) pengamanan hukum.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang tersaji pada diatas, terjadi peningkatan nilai aset setiap tahunnya yang diakibatkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengamanahkan penganggaran belanja modal sebesar 30% terhadap total APBD, walaupun alokasi belanja modal terhadap total APBD belum mencapai 30% namun setiap tahunnya telah ditekankan untuk peningkatan terhadap pengalokasian belanja modal. Pada tahun 2018 seluruh perangkat daerah melakukan reklaas dan penyusutan terhadap barang yang masa manfaatnya berkurang ataupun berakhir.

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini, yaitu antara lain:

- 1. Penjualan aset dengan sistem lelang terbuka memberikan pendapatan senilai Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2018.
- 2. Telah dilakukan penyusutan pada Barang Milik Daerah yang menyebabkan penurunan jumlah nilai aset daerah pada akhir tahun.
- 3. Adanya penerimaan pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa lahan untuk rumah mesin ATM Bank Sulselbar

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	EFISIENSI (%)
1	2	3	4=3/2
Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola	95,26% 3.905.950.216.246	98,60% 30.739.585.099	0,00966
Rata-rata Capaian Kinerja	95,26%		

Tabel 3.6. Analisis tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Hasil Analisis
	Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan keuangan aset daerah yang profesional	95,26%	98,60	0,00966	100%	100	0,01	-0,0338742	Tidak Efisien
1	Program Administrasi Perkantoran	95	99,06	0,95901	95	100	0,95	0,00948920	Efisien
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361	98,89	3,65052	361	100	3,61	0,01122459	Efisien
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107	93,74	1,14146	107	100	1,07	0,06678046	Efisien
	3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52	100	0,52021	52	100	0,52	0,00040016	Efisien
	4 Pengelolaan Gaji	9372	99,67	94,03030	9372	100	93,72	0,00331093	Efisien
	5 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	979	96	10,21281	1000	100	10	0,02128103	Efisien
	6 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	8	98	0,08164	8	100	0,08	0,02051230	Efisien
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97	98,60	0,98377	97	100	0,97	0,01419878	Efisien
	7 Pembangunan Gedung Kantor	1	99,00	0,01010	1	100	0,01	0,01010101	Efisien
	8 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	6	100,00	0,06000	6	100	0,06	0,00000000	Efisien
	9 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9	98,93	0,09097	9	100	0,09	0,01081573	Efisien
	10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30	98,91	0,30331	30	100	0,3	0,01102012	Efisien
	11 Pengadaan Mebeleur	2	99,89	0,02002	2	100	0,02	0,00110121	Efisien
	12 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	1	99,03	0,01010	1	100	0,01	0,00979501	Efisien
	13 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	7	97,94	0,07147	7	100	0,07	0,02103329	Efisien
	14 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	37	95,94	0,38566	37	100	0,37	0,04231812	Efisien

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Hasil Analisis
15	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	35	82,69	0,42327	35	100	0,35	0,20933607	Efisien
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	89	90,22	0,98648	90	100	0,9	0,09608611	Efisien
16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	110	99,00	1,11111	110	100	1,1	0,01010101	Efisien
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	94,20	1,06157	100	100	1	0,06157113	Efisien
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	66,25	0,07547	12	100	0,12	-0,3710691	Tidak Efisien
18	Sosialisasi Pajak	75	98,78	0,75926	75	100	0,75	0,01235068	Efisien
19	Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	45	98,66	0,45611	45	100	0,45	0,01358200	Efisien
5	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	15	52,23	0,28719	15	100	0,15	0,91460846	Efisien
20	Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	15	52,23	0,28719	15	100	0,15	0,91460846	Efisien

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dalam rangka mencapai kinerja Sasaran Pertama yang didukung oleh 5 (lima) program dan 20 kegiatan, seluruh program dan 19 (sembilan belas) kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Namun masih terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang tidak efisien. Inefisiensi kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan karena dengan penggunaan input sebesar 66.25% hanya mencapai output sebesar 5 dari target 12. Inefisiensi pada kegiatan tersebut diakibatkan padatnya kegiatan yang mengakibatkan tidak dapatnya mengikut sertakan ASN untuk Bimbingan sehingga dari target indikator kinerja Jumlah ASN yang mengikuti Bintek sebanyak 12 ASN hanya dapat dipenuhi sebanyak 5 ASN yang mengikuti Bintek Peraturan Perundang-undangan pada triwulan III dan triwulan IV.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 95.26%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 98.60% dari total anggaran yang dialokasikan, maka indeks efisiensi penggunaan sumber daya sasaran Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional adalah 0.99% dan tingkat efesiensi -0.0338747 atau (*tidak efisien*).

Banyaknya program yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan sasaran peningkatan jumlah sarana dan prasarana aparatu, Program Peningkatan Displin Aparatur, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan peningkatan aset daerah dan peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun capaian indikator sasaran bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola sebesar 95.26%.

Tabel 3.7. Keterkaitan Program terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional	Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola	31.176.697.350	30.739.585.099	98,60
Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	26.360.127.850	26.112.722.453	99,06
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur	4.247.325.000	4.187.673.946	98,60
Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kualitas Kinerja Aparatur	44.000.000	43.560.000	99,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik	289.000.000	272.229.400	94,20
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan	236.244.500	123.399.300	52,23

Alokasi anggaran untuk mendukung 4 (empat) program ini adalah sebesar Rp. 31.176.697.350,- realisasi sebesar Rp. 30.739.585.099,- atau 98.60% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Terlaksananya penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan output Tersedianya HGB Ex. Pasar Sentral Palakka dan Pengelolaan Penyelesaian Piutang, terlaksananya pemeliharaan dan penghapusan aset daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya bimbingan teknis implementasi tentang pengelolaan barang milik daerah sebanyak 100 Orang dari seluruh SKPD menjadi kegiatan inti dalam pencapaian sasaran strategis, sedangkan kegiatan lainnya menjadi kegiatan pendukung dalam pelaksanaan sasaran tercapainya

kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional dan sasaran lainnya.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain:

- 1. Khusus untuk aset tanah masih ada yang belum dilengkapi dokumen kepemilikan yang akurat (sertifikat) dan aset tanah yang telah dilengkapi dokumen kepemilikan memberi tambahan nilai atas aset tersebut.
- 2. Khusus untuk kendaraan dinas masih terdapat beberapa kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan (BPKB)
- 3. Penatausahaan aset SKPD belum sepenuhnya sesuai harapan,
- 4. Proses pengsertifikatan lahan yang membutuhkan waktu, dan
- 5. Beberapa aset yang ada pada SKPD dikuasai oleh orang yang tidak berhak, seperti orang yang sudah pensiun dan mutasi SKPD.

Aplikasi SIMBMD perlu di update atau penambahan fitur RKBMD guna menambahkan pemanfaatannya dalam mengintegrasikan RKBD pada sistem e-planning dan e-budgeting, dan perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi dan negosiasi secara berkelanjutan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Strategi:
Perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel.
- Kebijakan :
Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Kedua

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	100,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu	90%	90%	100,00
Penigkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit	97,30%	97,00%	99,69
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran belanja	95%	94%	99,00
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
	Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua	86,67%	84,94%	98,00
	Penetapan Perda/Perkada tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2017	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00
	Persentase penyajian Laporan Barang Milik daerah secara benar	72,73%	71,28%	98,01

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu bertambahnya meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan capaian **100%** telah **(mencapai target)** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai Opini WTP dari target Wajar Tanpa Pengecualian dengan persentase **100%** Capaian ini dikategorikan **(Baik)**. Begitu pula capaian terhadap indikator program penunjang sasaran tersebut mencapai rata-rata 99.24% atau dikategorikan **(Baik)**

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya Sasaran Kedua

Tabel 3.9. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah	WDP (LKPD 2012)	WDP (LKPD 2013)	WDP (LKPD 2014)	WTP (LKPD 2015)	WTP (LKPD 2016)	WTP (LKPD 2017)

Realisasi pada tahun 2018 mencapai opini WTP dari target WTP, tidak mengalami perubahan dari tahun 2017 yang WTP dari target WTP realisasi tahun 2016 merupakan capaian yang sangat istimewa selama priode 2013-2018 yaitu mencapai opini WTP pertama sejak tahun 2013,2014, dan 2015 yang mencapai WDP dari target WDP. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke tiga kalinya setelah 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015 , 2016 dan tahun 2017. Capaian tahun 2018 merupakan capaian pada target Akhir RPJMD Kabupaten Bone Priode 2013-2018, sehingga diharapkan target RPJMD Kabupaten Bone Priode 2018-2023 dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah dengan Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 100%. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan menyajikan :

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Bupati. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

- I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD);
- II. Entitas Pelaporan (SK-PKD);

Melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bone secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi SAP Berbasis Akrual.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain :

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Bone memasuki tahun ke 3 pada tahun 2018 ini, Walaupun salah satu indikator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017, namun masih dijumpai potensi permasalahan, yang antara lain:

- 1) Belum seluruhnya PPK-SKPD memahami dengan baik konsep akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- 2) Permasalahan aset yang memerlukan penanganan secara lebih cermat antara lain :
 - a. Persoalan penyerahan aset kepada SKPD pengguna;
 - b. Penanganan aset perolehan hibah yang tidak melalui mekanisme APBD;
- 3) Perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi dengan memasukkan hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi.

Laporan Keuangan dapat disusun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu cut off penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan Pemerintah Daerah juga sebagai alat evaluasi manajemen terhadap sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, apakah telah menyajikan informasi keuangan secara akurat sesuai transaksi yang diinput dalam bentuk buku jurnal. Apabila terdapat perbedaan antara transaksi yang diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Buku dapat disajikan secara wajar.

Langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrua tahun 2016 antara lain :

- 1) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrua dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrua;
- 2) Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrua;
- 3) Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- 4) Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone

Memperhatikan uraian tersebut di atas, capaian indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian “tercapai” Namun demikian secara kualitas persentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD yang mendukung Opini BPK RI dapat dipertanggungjawabkan, melalui pendampingan asistensi penyusunan Laporan Keuangan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga dapat dianggap seluruh Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD) sebanyak 66 SKPD, yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan telah dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrua.

Opini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Bone Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- 2) Laporan Arus Kas (LAK),
- 3) Neraca
- 4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 5) Laporan Operasional (LO);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu standar yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari saji material

Suatu pemeriksaan meliputi :

- 1) Bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 2) Penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bone;
- 3) Penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan;
- 4) Penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan; serta
- 5) Penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugasnya BPKAD Kabupaten Bone mempergunakan beberapa aplikasi penatausahaan keuangan dan aset daerah, antara lain:

- 1) SIAKUDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Penganggaran untuk penyusunan RKA/DPA SKPD melalui sistem aplikasi berbasis website yang terintegrasi dari aplikasi E-Planning;
- 2) SIAKUDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Penatausahaan untuk penyusunan dan Penatausahaan APBD yang Lengkap, terintegrasi dan mendukung penyajian Laporan Keuangan secara online keseluruhan SKPD serta monitoring penerbitan SP2D secara real time;
- 3) SIMBMD (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah), sistem yang digunakan untuk melakukan manajemen asset;
- 4) SIMGAJI (Sistem Informasi Manajemen Gaji) sistem yang digunakan untuk melakukan manajemen gaji PNS;
- 5) SIPBHP (Sistem Informasi Pengelolaan Barang Habis Pakai) sistem yang terintegrasi seluruh SKPD yang dimanfaatkan menyusun laporan realisasi Barang Habis Pakai;
- 6) SI KAREBA BUNDA (Sistem Informasi Bendahara Umum Daerah), sistem yang monitoring penerbitan SP2D secara real time berbasis digital;
- 7) SITATU (Sistem Informasi Taro Ada Taro Gau), sistem yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan.

Hasil audite LKPD oleh BPK RI masih mendapatkan lima catatan dikarenakan masih lemahnya pengawasan internal masing-masing perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehubungan dengan temuan tersebut BPK RI, merekomendasikan kepada Bupati Bone antara lain mengintruksikan kepada:

1. Kepala BPKAD lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM dalam rangka validasi data kepegawaian untuk diakomodir dalam database SIMGaji;
2. Kepala BKPSDM lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya;
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BKPSDM melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Kepala Sub Bidang Pengelola Gaji BPKAD mengenai database pegawai;
4. Sekretaris DPRD untuk memerintahkan kepada Bendahara DPRD untuk melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sesuai dengan ketentuan;
5. TAPD agar dapat melakukan verifikasi atas usulan belanja honorarium dalam RKA SKPD agar mengacu sesuai ketentuan yang berlaku;

- Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kesbangpol untuk lebih cermat dalam mengusulkan belanja honorarium RKA SKPD, serta memerintahkan pegawai-pegawai yang bersangkutan untuk mengembalikan selisih honorarium yang tumpang tindih/ganda dan selisih honorarium yang tidak mengacu sesuai SBU ke Kas Daerah;
- Kepala Dinas Perkimtan untuk memerintahkan PPK agar Penyedia Jasa CV AJR melakukan penyetoran ke Kas Daerah atas kekurangan volume pekerjaann sebesar Rp. 20.291.084,30; dan
- Kepala Desa terkait untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Rekomendasi tersebut adalah sebuah solusi yang sangat patut ditindaklanjuti bersama untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk menghindari ketidakpatuhan dan ketidakpatutan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan keberhasilan dari pencapaian indikator sasaran kedua ini disebabkan karena pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Persentase penyaluran belanja, Ketepatan Waktu Penetapan APBD, Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrual, Penetapan Perda/Perkada tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2017, dan Persentase penyajian Laporan Barang Milik daerah secara benar sangat mendukung pencapaian sasaran.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.10. Analisi atas Efisiensi terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	EFESIENSI (%)
1	2	3	4=3/2
Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah	WTP	87,72% 5.959.635.885	1,1400
Rata-rata capaian Kinerja	100		

Tabel 3.11. Tingkat Efisiensi terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Hasil Analisis
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan aset daerah	100	87,72	1,139991	100	100	1	0,13999088	Efisien
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90	98,25	0,916031	90	100	0,9	0,0178117	Efisien

No.		Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Hasil Analisis
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	97,53	1,025326	100	100	1	0,02532554	Efisien
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100	99,57	1,004319	100	100	1	0,00431857	Efisien
	3	Penyusunan dan Analisi Data Informasi Pembangunan Ekonomi	100	99,08	1,009285	100	100	1	0,00928543	Efisien
	3	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	100	99,98	1,0002	100	100	1	0,00020004	Efisien
	4	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	100	92,43	1,0819	100	100	1	0,08189982	Efisien
2		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97	99,02	0,9796	97	100	0,97	0,00989699	Efisien
	5	Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD	100	99,02	1,009897	100	100	1	0,00989699	Efisien
3		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	86,19	1,160227	100	100	1	0,1602274	Efisien
	6	Penyusunan Standar Satuan Harga	100	85,90	1,164144	100	100	1	0,16414435	Efisien
	7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	100	99,67	1,003311	100	100	1	0,00331093	Efisien
	8	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	100	98,65	1,013685	100	100	1	0,01368474	Efisien
	9	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	100	93,68	1,067464	100	100	1	0,06746371	Efisien
	10	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	92,35	1,082837	100	100	1	0,08283703	Efisien
	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	98,15	1,018849	100	100	1	0,0188487	Efisien
	12	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	92,49	1,081198	100	100	1	0,08119797	Efisien
	13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	99,83	1,001703	100	100	1	0,00170289	Efisien
	14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	100	32,46	3,080715	100	100	1	2,08071473	Efisien
	15	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	100	87,41	1,144034	100	100	1	0,14403386	Efisien
	16	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	100	99,91	1,000901	100	100	1	0,00090081	Efisien
	17	Pengamanan Aset Daerah	100	82,88	1,206564	100	100	1	0,20656371	Efisien
	18	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Nota Keuangan APBD	100	97,74	1,023123	100	100	1	0,02312257	Efisien
	19	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	100	96,39	1,037452	100	100	1	0,03745202	Efisien
	20	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	100	73,56	1,359434	100	100	1	0,35943448	Efisien
	21	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	100	77,46	1,290989	100	100	1	0,2909889	Efisien
	22	Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	62,71	1,594642	100	100	1	0,594642	Efisien
	23	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	100	99,99	1,0001	100	100	1	0,00010001	Efisien
	24	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019	100	66,83	1,496334	100	100	1	0,49633398	Efisien
	25	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2019	100	57,01	1,754078	100	100	1	0,75407823	Efisien

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Hasil Analisis
26	Penilaian Barang Milik Daerah	100	50,51	1,979806	100	100	1	0,97980598	Efisien
27	Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	97,41	1,026589	100	100	1	0,02658865	Efisien
28	Pengelolaan Administrasi data Kearsipan Keuangan	100	76,07	1,314579	100	100	1	0,31457868	Efisien
29	Penyusunan rancangan Perda tentang Penyertaan Modal	100	44,16	2,264493	100	100	1	1,26449275	Efisien
30	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Bayar	100	99,81	1,001904	100	100	1	0,00190362	Efisien
31	Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan daerah	100	98,12	1,01916	100	100	1	0,01916021	Efisien
32	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	100	96,79	1,033165	100	100	1	0,03316458	Efisien
33	Pembinaan dan Pengelolaan penyusunan Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	100	90,73	1,102171	100	100	1	0,10217128	Efisien
34	Pelaporan Aset	100	65,53	1,526019	100	100	1	0,52601862	Efisien

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dalam rangka mencapai kinerja Sasaran Kedua yang didukung oleh 3 (tiga) program dan 34 kegiatan, seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 87.72% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.6.794.097.900,- hanya direalisasikan Rp.5.959.635.885,-, maka indeks efisiensi penggunaan sumber daya sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 1.139 dan tingkat efesiensi 0.139 atau (*efisien*).

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menciptakan laporan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas yaitu Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian. Sebagai catatan atas target capaian kinerja ini yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh harus disertai dengan pengurangan nilai temuan dan rekomendasi hasil audit BPK-RI dibandingkan hasil audit LKPD tahun sebelumnya.

Tabel 3.12. Keterkaitan Program terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah	6.794.097.900,-	5.959.635.885,-	87.72
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu	551.823.600	542.158.829	98,25
Penigkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit	265.880.100	263.274.170	99,02
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran belanja	5.937.084.200	5.116.912.886	86,19
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD			
	Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrual			
	Penetapan Perda/Perkada tentang Pertanggungjawaban APBD			
	Persentase penyajian Laporan Barang Milik daerah secara benar			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah telah mencapai target indikator utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dimana opini BPK sebagai hasil audit yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bone Tahun Anggaran 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.6.794.097.900,- realisasi sebesar Rp.5.959.635.885,- atau 87.72% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya penyusunan standar satuan harga sebanyak 2 dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd sebanyak 1 Dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD sebanyak 1 Dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebanyak 1 Dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

sebanyak 1 Dokumen, terlaksananya penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sebanyak 75 peserta, terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barang daerah sebanyak 66 SKPD, penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan APBD sebanyak 66 SKPD, terlaksananya pengamanan aset daerah, terlaksananya penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara dan nota keuangan APBD sebanyak 1 dokumen, terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan SIMDA sebanyak 66 SKPD, terlaksananya labelisasi aset sebanyak 2 jenis aset, terlaksananya penyusunan daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang/jasa sebanyak 2 dokumen, terlaksananya peningkatan administrasi pelaporan pajak daerah sebanyak 12 laporan, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2018 sebanyak 1 dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD tahun 2018 sebanyak 1 dokumen, terlaksananya studi banding pengelolaan keuangan daerah sebanyak 50 orang, terlaksananya penilaian barang milik daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang barang milik daerah sebanyak 1 dokumen, terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya pengelolaan administrasi data kearsipan keuangan sebanyak 12 Kali, terlaksananya pengelolaan sistem dan verifikasi surat perintah membayar sebanyak 7000 SPM, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebanyak 1 dokumen, terlaksananya peningkatan pelaporan administrasi keuangan daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya pembinaan dan pengelolaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 66 SKPD, terlaksananya pelaporan aset sebanyak 12 laporan.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Permasalahan terhadap sasaran kedua ini yaitu masih adanya beberapa temuan hasil audite BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone dikarenakan kurang optimalnya pimpinan Perangkat Daerah ataupun pejabat penatausahaan keuangan melakukan sistem pengawasan internal dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu masih adanya Perangkat Daerah yang tidak cermat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Namun demikian penerapan SAP berbasis akrual dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK–RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017, terdapat beberapa cacatan yaitu:

- 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Belum dikelola secara cermat;
- 2) Kelebihan pembayaran atas Tunjangan Komunikasi Insentif, dana Operasional dan Tunjangan Reses Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone;
- 3) Belanja Honorarium dan Jasa/Upah Kerja kepada empat SKPD tidak sesuai ketentuan;
- 4) Realisasi Belanja Modal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.110.627.564.30;dan
- 5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBdesa belum disampaikan kepada Bupati Bone sebesar Rp.1.579.401.444,00

Alternatif solusi yang perlu dilakukan yaitu menindaklanjuti segala rekomendasi BPK RI atas bentuk catatan temuan tersebut.

C. Sasaran 3 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- Strategi:
Mencegah kebocoran pendapatan.
- Kebijakan :
Peningkatan koordinasi dan evaluasi sumber pendapatan daerah.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran 3

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

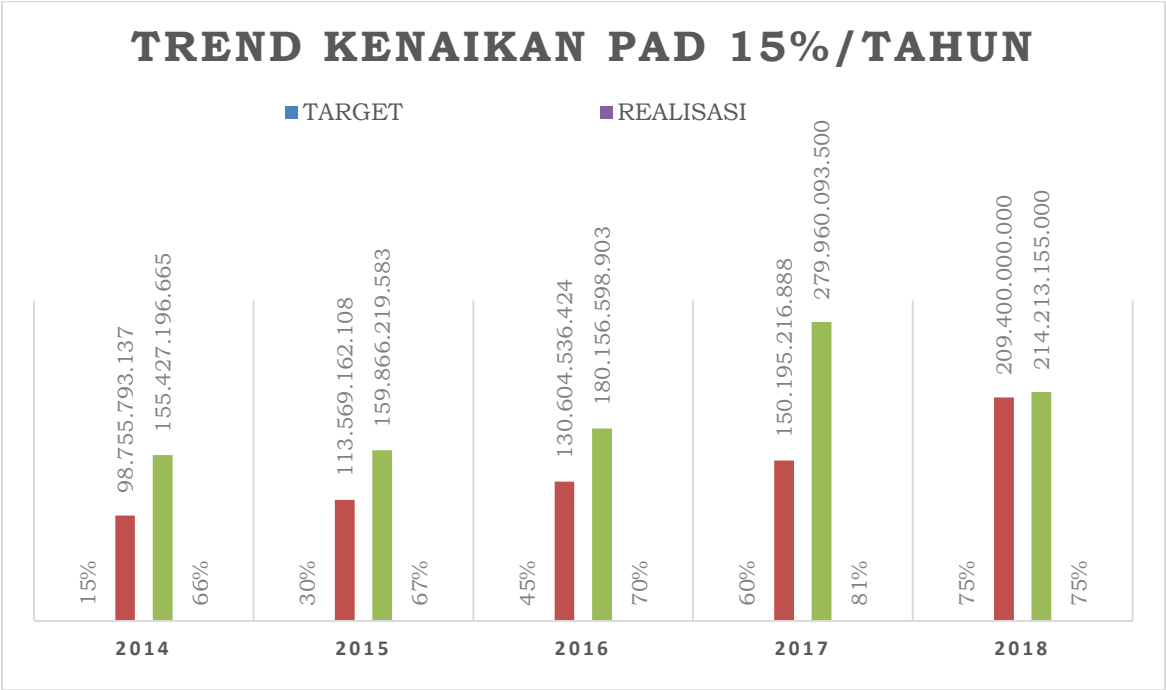
Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
Trend kenaikan PAD 15%/tahun.	75% 209.400.000.000	75,56% 214.213.155.000	101%

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya
Sasaran ketiga**

*Tabel 3.14. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah*

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Trend kenaikan PAD 15%/tahun.	39,04	66,32	67,26	70,94	81,30	75,56
	85.874.602.728	155.427.196.665	159.866.219.583	180.156.598.903	279.960.093.500	214.213.155.000

*Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*



Realisasi pada tahun 2018 mencapai 75.56% Rp.214.213.155.000 melampaui dari target Rp.209.400.000.000, atau 75% namun mengalami penurunan dari tahun 2017 yang mencapai 81.30% dari target 60%. Realisasi setiap tahunnya melampaui target yang telah ditetapkan, dimana PAD mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata 28% pertahun, dan berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 senilai Rp.279.960.093.500,- dan tahun 2018 realisasi senilai Rp.214.213.155.000,- atau 30.69% diakibatkan beberapa faktor yang antara lain:

1. Adanya potensi sumber pendapatan yang dapat dikelola
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan pendapatan
3. Mencegah kebocoran sumber pendapatan dengan memperkuat koordinasi
4. Pemberian penghargaan dan sanksi bagi pengelola pendapatan

Capaian tahun 2018 merupakan capaian pada target Akhir RPJMD Kabupaten Bone Priode 2013-2018, yang mana target pertumbuhan PAD pada Akhir RPJMD yaitu 75% dan pada tahun 2018 dapat terealisasi 75.56% atau persentase capaian 100.75%, sehingga diharapkan target RPJMD Kabupaten Bone Priode 2018-2023 dapat ditingkatkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Peranan Pendapatan Asli Daerah di dalam penerimaan Pemerintah Daerah sangat diharapkan dalam pembangunan daerah. Salah satu indikator turunnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah meningkatnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun eksentifikasi sehingga daerah memiliki dana signifikan dalam rangka membiayai pembangunan daerah guna mensejahterahkan masyarakat.

Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan capaian Persentase Peningkatan PAD telah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi PAD pada tahun 2018 mencapai 75,56% (tujuh puluh lima koma lima puluh enam persen), dari target 75% (tujuh puluh lima persen), dengan persentase capaian 100.75%

Pada tahun 2018 capaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 100.75% diperoleh dari beberapa sektor pendapatan, antara lain:

Jumlah realisasi PAD tahun 2018

Target PAD tahun 2018

X 100

Rp.214.213.155.032 (75,56%)

Rp.209.400.000.000 (75,00%)

X 100 = 100,75%

Tabel 3.15. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

NO	URAIAN	TARGET	RELISASI	CAPAIAN %
1,1	Pendapatan Asli Daerah	199.472.831.779	214.213.155.033	107,39
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.636.794.167	51.236.484.457	123,06
1.1.2	Pendaptan Retribusi Daerah	22.455.566.712	19.652.213.419	87,52
1.1.3	Pendaptan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	7.092.406.600	7.055.937.640	99,49
1.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128.288.064.300	136.268.519.517	106,22

Realisasi PAD dari sektor Pajak realisasi sebesar Rp.51.271.353.220 telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp.41.636.794.167 dengan persentase 123.06%, realisasi sektor retribusi daerah dengan capaian Rp.19.652.213.419 kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp.22.455.566.712 dengan persentase 87.52%. Adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdampak terbatasnya peluang Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi sektor Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dengan capaian Rp.7.055.937.640 kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp.7.092.406.600 dengan persentase 99,49%, dan realisasi sektor Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan capaian Rp.136.268.519.517 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 128.288.064.300 dengan persentase 106,22%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone yang meningkat dari tahun ketahun dengan capaian sebesar +9% melampaui capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan target Nasional, namun tidak dibarengi dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang tersaji pada tabel diatas, terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya yang melebihi target yang telah ditentukan diakibatkan oleh peningkatan pendapatan BLUD Rumah Sakit Tenriawaru dan terdapat sumber-sumber pendapatan yang pengelolaannya lebih maksimal.

Sebagai catatan atas target capaian kinerja ini, yaitu target indikator kinerja setiap tahunnya ditetapkan pada Renstra yaitu kenaikan PAD setiap tahunnya 15%/tahun dan target 75% pada tahun 2018 telah melampaui target yang telah ditetapkan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16. Analisi atas Efesiensi terhadap Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	EFESIENSI (%)
1	2	3	4=3/2
Trend kenaikan PAD 15%/tahun.	101% 214.213.155.000	88,60% 158.776.450	1,0600
Rata-rata capaian Kinerja	101%		

Tabel 3.17. Tingkat Efisiensi terhadap Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Hasil Analisis
	Meningkatnya PAD	75,56	88,60	0,852822	75	100	0,75	0,13709556	Efisien
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	93,92	88,60	1,060045	95	100	0,95	0,115837	Efisien
1	Peningkatan Pelaksanaan TGR	17	88,60	0,191874	10	100	0,1	0,91873589	Efisien

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dalam rangka mencapai kinerja Sasaran Ketiga yang didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 101%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 88.60% dari total anggaran yang dialokasikan, maka indeks efisiensi penggunaan sumber daya sasaran Meningkatnya PAD adalah 0.85% dan tingkat efesiensi 0.137 atau (*efisien*).

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Tujuan dari program ini adalah penyelesaian kasus TGR. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.9 diatas yaitu Trend kenaikan PAD 15%/tahun dengan capaian sebesar 101%.

Tabel 3.18. Keterkaitan Program terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya PAD	Trend kenaikan PAD 15%/tahun.	75% 209.400.000.000	75,56% 214.213.155.000	101%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pengembalian kerugian negara	179.204.750	158.776.450	88,60

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 179.204.750,- realisasi sebesar Rp.158.776.450,- atau 88.60% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Terlaksananya peningkatan pelaksanaan TGR, dengan outcame Mengoptimalkan pengembalian dana TGR sebanyak 10 kasus dengan realisai sebanyak 17 kasus yang disidangkan, terwujudnya pengelolaan administrasi pendapatan daerah dan terwujudnya ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi kegiatan inti dalam pelaksanaan sasaran tercapainya meningkatkan pendapatan asli daerah.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan pada sasaran meningkatkan pendapatan asli daerah, namun masih tetap ada permasalahan di lapangan yaitu adanya beberapa sumber-sumber pendapatan belum dikelola secara maksimal, adanya beberapa wajib pajak yang tidak patuh pada peraturan perundang-undangan maka masih perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi dalam pengelolaan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketepatan waktu sebagai wajib pajak.

Sedangkan keberhasilan dari pencapaian indikator sasaran ketiga ini disebabkan karena pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan indikator Persentase pengembalian kerugian negara, sangat mendukung pencapaian target sasaran.

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 36.857.997.434,- atau 96.61%

Anggaran Kinerja:

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 21.725.750.319- (89.79%)
- Belanja Langsung	<u>Rp. 36.857.997.434- (96.61%)</u>
Jumlah	Rp. 58.583.747.753,- (93.97%)

3.2.2 Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 21.725.750.319,- (89.79%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 19.508.819.316,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 0,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 36.857.997.434,- (96.61%) dengan jumlah 10 program dan 57 kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 dengan Tahun Sebelumnya

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	BELANJA LANGSUNG	38.150.000.000	36.857.997.434	96,61	34.713.787.213
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.360.127.850	26.112.722.453	99,06	26.173.573.682
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Input	22.171.200.000	22.044.349.036	99,43	21.648.461.693
	Output : Jumlah Rekening yang di Bayar	361 Rekening	367 Rekening		361 Rekening
	Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	95%	95%		100%
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				
	Input	657.456.948	616.320.520	93,74	730.977.513
	Output : Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak/Sukarela yang menerima tunjangan	107 PNS dan Tenga Kontrak/Sukarela	107 PNS dan Tenga Kontrak/Sukarela		12 Bulan
	Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	95%	95%		100%
	- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Input	304.467.902	304.350.000	99,96	298.180.000
	Output : Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	52 Media	52 Media		12 Bulan
	Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	95%	95%		100%
	- Kegiatan Pengelolaan Gaji				
	Input	337.929.000	336.809.300	99,67	449.505.300
	Output : Jumlah PNS yang Menerima Gaji	9372 PNS	9218 PNS		12 Bulan
	Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	95%	95%		100%
	- Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah				
	Input	945.000.000	905.877.597	95,86	682.995.626
	Output : Jumlah SPPD	979 SPPD	1042 SPPD		12 Bulan
	Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	95%	95%		100%
	- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				
	Input	1.944.074.000	1.905.016.000	97,99	2.363.453.550
	Output : Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran	8 Paket	8 Paket		12 Bulan
	Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	95%	95%		100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.247.325.000	4.187.673.946	98,60	1.248.994.801
	- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor				
	Input	50.000.000	49.500.000	99,00	86.771.000
	Output : Jumlah Dokumen Pembangunan Gedung Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Unit Motor
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	97%	97%		100%
	- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				
	Input	2.864.000.000	2.864.000.000	100,00	86.771.000
	Output : Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	6 Unit Mobil	6 Unit Mobil		1 Unit Motor
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	97%	97%		100%
	- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				
	Input	75.000.000	74.200.000	98,93	117.000.000
	Output : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	AC Unit	AC Unit		3 Unit
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	97%	97%		100%
	- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				
	Input	299.225.000	295.950.000	98,91	220.000.000
	Output : Jumlah Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	15 Unit		25 Unit
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	97%	97%		100%
	- Kegiatan Pengadaan Mebeleur				
	Input	87.500.000	87.400.000	99,89	38.000.000
	Output : Jumlah Kebutuhan Mebelur	1 Set Sofa Jati Plus & Almari	1 Set Sofa Jati Plus & Almari		2 Set
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	97%	97%		100%
	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas				
	Input	73.000.000	72.293.000		
	Output : Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	1 Paket	1 Paket		
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	97%	97%		
	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor				
	Input	307.500.000	301.153.000	97,94	193.850.000
	Output : Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	7 Paket	7 Paket		12 Bulan
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	97%	97%		100%
	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional				
	Input	280.000.000	268.627.946	95,94	305.822.801
	Output : Jumlah Mobil dan Motor yang di Pelihara	37 Unit	37 Unit		36 Unit

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	97%	97%		25%
	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor				
	Input	211.100.000	174.550.000	82,69	200.780.000
	Output : Jumlah Peralatan yang di Pelihara Gedung Kantor	35 Unit	35 Unit		12 Bulan
	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	97%	97%		85%
	- Peningkatan Disiplin Aparatur	44.000.000	43.560.000		
	- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				
	Input	44.000.000	43.560.000		
	Output : Jumlah baju Olahraga	110 Pasang	110 Pasang		
	Outcome : Persentase kualitas kinerja aparatur	90%	90%		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	289.000.000	272.229.400	94,20	296.782.000
	- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				
	Input	40.000.000	26.500.000	66,25	29.450.000
	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	12 ASN	12 ASN		10 orang
	Outcome : Persentase ASN yang memahami tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	100%	100%		85%
	- Kegiatan Sosialisasi Pajak				
	Input	49.000.000	48.400.000	98,78	54.750.000
	Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak	75 Peserta	75 Peserta		1 Kegiatan
	Outcome : Persentase ASN yang memahami tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	100%	100%		95%
	- Kegiatan Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Input	200.000.000	197.329.400	98,66	212.582.000
	Output :Jumlah Peserta StudiBanding	45 ASN / Tenaga Kontrak	45 ASN / Tenaga Kontrak		1 Kegiatan
	Outcome : Persentase ASN yang memahami tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	100%	100%		95%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	551.823.600	542.158.829	98,25	512.671.000
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Input	100.455.300	97.969.129	97,53	42.726.000
	Output : Tersedianya dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen		4 Dokumen
	Outcome : Persentase kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu	90%	90%		100%
	- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				
	Input	39.974.100	39.804.100	99,57	29.197.500
	Output : Jumlah Laporan Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen		45 Eksamplar

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6
	Outcome : Persentase kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu	90%	90%		100%
-	Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data Informasi Pembangunan Ekonomi				
	Input	36.960.000	36.619.000	99,08	56.020.000
	Output : Jumlah Desa RTS	20 Desa	20 Desa		21 Desa
	Outcome : Persentase kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu	90%	90%		1 Kecamatan
-	Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban				
	Input	286.400.000	286.399.000	100,00	342.260.000
	Output : Jumlah SKPD yang melakukan Verifikasi SPJ	39 SKPD 27 Kecamatan	39 SKPD 27 Kecamatan		67 SKPD
	Outcome : Persentase kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu	90%	90%		100%
-	Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran				
	Input	88.034.200	81.367.600	92,43	42.467.500
	Output : Jumlah Laporan SISMON Teptra Bebas Online SKPD	12 Laporan	12 Laporan		13 Laporan
	Outcome : Persentase kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu	90%	90%		100%
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	265.880.100	263.274.170	99,02	281.557.386
-	Kegiatan Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD				
	Input	265.880.100	263.274.170	99,02	281.557.386
	Output : Peningkatan Pelaksanaan dan Kas Daerah Oleh BUD	7450 SP2D	7450 SP2D		7450 SP2D
	Outcome : Persentase SP2D yang terbit kurang 2 (dua) hari terhadap SP2D yang terbit	97.30%	97.30%		100%
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	236.244.500	123.399.300	52,23	131.777.500
-	Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah				
	Input	236.244.500	123.399.300	52,23	131.777.500
	Output : Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan	15 HGB	15 HGB		12 Bulan
	Outcome : Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat hak guna bangunan	29.61%	29.61%		100%
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	39.310.000	37.290.000	94,86	12.488.000
-	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi				
	Input	39.310.000	37.290.000	94,86	12.488.000
	Output : Jumlah Informasi yang diupload	20 Berita	20 Berita		1 Paket
	Outcome : Persentase kualitas dokumen acuan pelaksanaan program kegiatan	90%	90%		100%
9	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.937.084.200	5.116.912.886	86,19	5.596.005.310
-	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga				
	Input	128.702.500	110.556.000	85,90	118.957.000
	Output : Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Semester

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6
	Outcome : Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang	100%	100%		90%
	- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD				
	Input	174.835.000	174.259.967	99,67	205.955.680
	Output : Jumlah Dokumen Perda APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		200 Eks
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		100%
	- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD				
	Input	152.037.100	149.983.250	98,65	162.405.500
	Output : Jumlah Dokumen Perda APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		200 Eks
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		100%
	- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				
	Input	203.250.000	190.407.741	93,68	202.127.500
	Output :Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		200 Eks
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		100%
	- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD				
	Input	216.575.000	200.014.145	92,35	181.184.500
	Output : Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		200 Eks
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		100%
	- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
	Input	253.910.000	249.217.970	98,15	247.713.700
	Output : Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawaban	1 Dokumen	1 Dokumen		75 Eksamplar
	Outcome : Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua	86.67%	86.67%		100%
	- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
	Input	167.121.900	154.569.260	92,49	177.985.500
	Output : Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016	1 Dokumen	1 Dokumen		75 Eksamplar
	Outcome : Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua	86.67%	86.67%		100%
	- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah				
	Input	266.954.000	266.504.000	99,83	488.634.000
	Output : Tepeliharanya Sistem Informasi Pegelolaan Keuangan Daerah (Penatausahaan Akuntansi)	1 Software	1 Software		12 Bulan
	Outcome : Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua	86.67%	86.67%		100%
	- Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Input	338.321.750	109.835.850	32,46	92.969.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6
	Output : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	8 Kali	8 Kali		2 Kali
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		1 Tahun
-	Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah				
	Input	416.994.000	364.507.378	87,41	408.714.843
	Output : Terlaksananya Pengelolaan Manajemen Aset Barang Daerah	3 Laporan	3 Laporan		12 Bulan
	Outcome : Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang	72.73%	72.73%		100%
-	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD				
	Input	311.626.000	311.336.900	99,91	290.895.500
	Output : Jumlah DPA dan DPPA SKPD	132 DPA/DPP-A	132 DPA/DPP-A		39 SKPD 27 kecamatan
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		1 Tahun
-	Kegiatan Pengamanan Aset Daerah				
	Input	171.134.500	141.834.300	82,88	146.628.200
	Output : Daftar Aset yang dimiliki	39 SKPD 27 Kecamatan	39 SKPD 27 Kecamatan		12 Bulan
	Outcome : Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang	72.73%	72.73%		100%
-	Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Nota Keuangan APBD				
	Input	111.072.500	108.562.950	97,74	97.200.000
	Output : Jumlah Dokumen Rancangan PPAS APBD dan Rancangan Nota Keuangan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen		70 Eksamplar
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		1 Tahun
-	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA				
	Input	91.810.000	88.497.000	96,39	287.460.500
	Output : Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA	1 Paket	1 Paket		1 Paket
	Outcome : Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang	1 Software	1 Software		1 Tahun
-	Kegiatan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah				
	Input	119.216.900	87.695.000	73,56	104.148.900
	Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Asset	2 Kegiatan	2 Kegiatan		12 Bulan
	Outcome : Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang	72.73%	72.73%		100%
-	Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa				
	Input	61.368.000	47.536.000	77,46	73.096.000
	Output : Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen		12 Bulan
	Outcome : Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang	72.73%	72.73%		100%
-	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	Input	97.290.000	61.006.000	62,71	59.493.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6
	Output : Jumlah Peserta Bimtek/Angkatan	70 ASN	70 ASN		1 Kegiatan
	Outcome : Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang	72.73%	72.73%		100%
-	Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah				
	Input	139.572.750	139.572.700	100,00	111.572.750
	Output : Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	820 Faktur Pajak	2,781 Faktur Pajak		1 Tahun
	Outcome : Persentase penyaluran belanja daerah	95%	95%		100%
-	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019				
	Input	157.740.000	105.423.100	66,83	123.977.837
	Output : Jumlah Dokumen Perda APBD Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen		200 EKS
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		1 Tahun
-	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2019				
	Input	141.670.000	80.765.900	57,01	116.531.750
	Output : Jumlah Dokumen PerKDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen		200 EKS
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		1 Tahun
-	Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah				
	Input	134.980.250	68.182.000	50,51	103.921.500
	Output : Jumlah SKPD yang diNilai	1 Laporan	1 Laporan		12 Bulan
	Outcome : Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang	72.73%	72.73%		100%
-	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Input	431.890.000	420.718.800	97,41	439.206.750
	Output : Pengelolaan, Pemeliharaan dan pengembangan sistem penyusunan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran secara online	39 SKPD 27 Kecamatan	39 SKPD 27 Kecamatan		12 Bulan
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		100%
-	Kegiatan Pengelolaan Administrasi data Kearsipan Keuangan				
	Input	37.500.000	28.527.000	76,07	34.521.800
	Output : Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	12 Kali	12 Kali		12 Bulan
	Outcome : Persentase penyaluran belanja daerah	95%	95%		100%
-	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal				
	Input	90.198.000	39.828.800		
	Output : Jumlah Dokumen Perda Penyertaan Modal	1 Dokumen	1 Dokumen		
	Outcome : Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
-	Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar				
	Input	320.972.750	320.372.500	99,81	367.017.750
	Output : Jumlah SPM yang diterbitkan	7000 SPM	7000 SPM		7000 SPM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6
	Outcome : Persentase penyaluran belanja daerah	95%	95%		100%
	- Kegiatan Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan daerah				
	Input	389.600.000	382.271.150	98,12	285.669.900
	Output : Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	12 Laporan	12 Laporan		12 Bulan
	Outcome : Persentase penyaluran belanja daerah	100%	100%		100%
	- Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Input	389.953.800	377.420.750	96,79	401.710.000
	Output : Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	39 SKPD 27 Kecamatan	39 SKPD 27 Kecamatan		12 Bulan
	Outcome : Persentase penyaluran belanja daerah	100%	100%		100%
	- Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
	Input	245.065.000	222.354.500	90,73	196.598.750
	Output : Jumlah Dokumen Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaa APBD	792 Laporan	792 Laporan		65 Eksamplar
	Outcome : Meningkatnya koordinasi SKPD / instansi terkait laporan keuangan	86.67%	86.67%		100%
	- Kegiatan Pelaporan Aset				
	Input	175.722.500	115.151.975	65,53	69.707.200
	Output : Jumlah Laporan Aset	2 Laporan	2 Laporan		4 Laporan
	Outcome : Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang	100%	100%		100%
10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	179.204.750	158.776.450	88,60	163.728.726
	- Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan TGR				
	Input	179.204.750	158.776.450	88,60	163.728.726
	Output : Penyelesaian Kasus TGR	10 Kasus	45 Kasus		3 Kali Sidang
	Outcome : Mengoptimalkan pengembalian dana TGR	95%	95%		100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.38.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.857.997.434,00 atau 96.61%, sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2017, dengan Anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 35.729.219.000,- realisasi sebesar Rp. 34.713.787.213,- atau 97.16%, disebabkan kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang outputnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) aset daerah yang belum selesai proses penerbitannya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone, dan pada kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan yang realisasi anggarannya sangat rendah disebabkan oleh target pelaksanaan kegiatan sosialisasi tidak tercapai, serta adanya beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai target, namun tahapan uraian kegiatan dan capaian program/kegiatan telah terlaksana.

Tabel 3.20 Target dan Realisasi APBD Tahun 2013, 2014, 2015, 2016,2017 dan 2018

NO	URAIAN	TAHUN																	
		TARGET 2018	REALISASI 2018	%	TARGET 2017	REALISASI 2017	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2014	REALISASI 2014	%	TARGET 2013	REALISASI 2013	%
4	PENDAPATAN	2.270.156.586.646	2.252.116.159.287	99,21	2.236.755.852.100	2.201.181.670.675	98,41	2.132.118.400.602	2.060.485.051.944	96,6	1.671.266.086.750	1.898.232.541.152	113,6	1.464.333.560.100	1.533.031.760.003	104,7	1.322.838.198.060	1.393.635.990.571	105,4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	199.472.831.779	214.213.155.033	107,39	267.173.137.100	279.960.093.500	104,79	177.333.582.070	180.156.598.903	101,6	156.421.992.399	159.866.219.584	102,2	149.205.060.559	155.427.196.666	104,2	80.263.949.932	85.874.602.729	107,0
4.1.1	Pajak Daerah	41.636.794.167	51.236.484.457	123,06	36.983.033.600	44.726.076.045	120,94	35.083.033.385	37.605.711.247	107,2	32.178.841.100	34.613.923.937	107,6	29.406.819.100	36.277.176.531	123,4	14.895.850.055	14.573.196.587	97,8
4.1.2	Retribusi Daerah	22.455.566.712	19.652.213.419	87,52	12.671.944.000	12.795.043.203	100,97	14.343.221.684	11.336.148.488	79,0	14.005.987.000	14.505.987.000	103,6	15.376.587.000	15.378.571.068	100,0	13.446.184.227	14.058.276.983	104,6
4.1.3	Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.092.406.600	7.055.937.640	99,49	6.364.434.900	6.727.965.905	105,71	2.886.469.000	4.179.816.872	144,8	2.336.469.000	2.936.469.000	125,7	2.036.469.000	2.331.537.248	114,5	1.750.000.000	1.989.585.215	113,7
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	128.288.064.300	136.268.519.517	106,22	211.153.724.600	215.711.008.347	102,16	103.323.525.793	127.034.922.297	122,9	94.763.709.350	104.365.612.462	110,1	53.296.361.400	101.439.911.819	190,3	50.171.915.650	55.253.543.944	110,1
4.2	Dana Perimbangan	1.568.604.640.867	1.548.309.677.324	98,71	1.555.594.547.000	1.512.633.984.416	97,24	1.565.186.413.780	52.114.930.328	3,3	1.260.075.685.600	1.242.614.366.711	98,6	1.084.716.798.300	1.083.624.984.390	99,9	1.028.563.164.914	1.022.606.590.153	99,4
4.2.1	Dana Bagi Hsl Pajak/Bagi Hsl Bukan Pajak	30.388.132.867	23.302.043.707	76,68	38.130.058.000	31.407.240.349	82,37	53.458.237.780	52.114.930.328	97,5	52.361.110.600	34.897.311.711	66,6	37.418.970.309	46.907.340.390	125,4	72.504.853.914	66.548.279.153	91,8
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.070.426.493.000	1.070.426.493.000	100,00	1.069.494.543.000	1.069.494.543.000	100,00	1.088.618.062.000	1.088.618.062.000	100,0	977.807.065.000	977.807.065.000	100,0	950.401.934.000	950.401.934.000	100,0	867.813.851.000	867.813.851.000	100,0
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	467.790.015.000	454.581.140.617	97,18	447.969.946.000	411.732.201.067	91,91	423.110.114.000	399.887.704.226	94,5	229.907.510.000	229.909.990.000	100,0	86.315.710.000	86.315.710.000	100,0	88.244.460.000	88.244.460.000	100,0
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	502.079.114.000	489.593.326.930	97,51	413.988.168.000	408.587.592.759	98,70	317.965.056.094	321.751.879.398	101,2	481.734.863.153	467.752.618.551	97,1	309.690.085.135	295.595.581.529	95,4	279.145.375.725	284.257.720.192	101,8
4.3.1	Hibah	91.765.615.000	85.040.830.500	92,67	-	-	-	11.038.190.000	11.038.188.960	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Dana Bagi Hsl. Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	74.983.000.000	72.110.586.785	96,17	81.104.000.000	76.881.029.359	94,79	70.092.015.916	75.918.025.272	108,3	67.138.405.753	53.871.562.151	80,2	58.189.630.375	50.761.528.815	87,2	35.379.729.694	35.529.773.232	100,4
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	307.386.499.000	306.620.285.200	99,75	306.940.168.000	306.700.190.600	99,92	202.773.125.000	202.773.125.000	100,0	388.189.433.000	385.474.033.000	99,3	217.767.982.000	217.767.982.000	100,0	205.216.013.440	209.323.435.000	102,0
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	27.944.000.000	25.821.624.445	92,40	25.944.000.000	25.006.372.800	96,39	34.061.725.178	32.022.540.166	94,0	26.407.024.400	28.407.023.400	107,6	33.732.472.760	27.066.070.714	80,2	38.549.632.591	39.404.511.960	102,2
4.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Belanja	2.353.404.828.655	2.235.998.362.700	95,01	2.335.930.580.063	2.240.431.074.375	95,91	2.184.766.158.776	2.045.111.813.069	93,6	2.020.021.255.842	1.841.775.310.345	91,2	1.621.565.104.168	1.487.000.153.623	91,7	1.466.382.906.487	1.366.450.547.030	93,2
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.449.797.031.740	1.359.314.685.231	93,76	1.354.075.542.816	1.322.409.001.832	97,66	1.364.718.123.160	1.296.194.903.754	95,0	1.268.991.948.432	1.192.434.833.096	94,0	590.242.005.350	542.306.609.820	91,9	934.347.131.187	873.429.900.835	93,5
5.1.1	Belanja Pegawai	927.270.742.459	849.608.038.076	91,62	878.446.141.656	862.728.295.367	98,21	980.945.461.358	922.893.000.080	94,1	1.011.608.534.016	894.670.854.461	88,4	450.242.949.622	431.717.602.972	95,9	826.155.421.691	776.378.305.231	94,0

NO	URAIAN	TAHUN																	
		TARGET 2018	REALISASI 2018	%	TARGET 2017	REALISASI 2017	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2014	REALISASI 2014	%	TARGET 2013	REALISASI 2013	%
5.1.2	Belanja Bunga	3.310.970.000	253.351.574	7,65	1.543.751.000	590.230.716	38,23	3.310.970.000	929.417.250	28,1	3.312.170.644	1.265.189.968	38,2	3.310.969.644	1.601.042.182	48,4	2.310.969.644	1.941.935.991	84,0
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	7.297.509.288	7.297.509.288	-	28.630.890.582	28.630.890.582	100,0	31.946.719.625	31.909.347.649	99,9	29.192.497.000	28.917.126.275	99,1
5.1.4	Belanja Hibah	104.514.007.050	97.608.807.050	93,39	43.856.381.000	33.521.141.213	76,43	16.694.200.000	11.262.890.000	67,5	7.257.500.000	2.157.500.000	29,7	12.435.000.000	6.482.500.000	52,1	22.360.909.000	15.637.817.355	69,9
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.850.000.000	5.980.000.000	87,30	50.981.862.000	49.761.862.000	97,61	35.463.958.014	35.108.958.014	99,0	1.280.000.000	50.960.276.170	3.981	3.850.000.000	3.349.500.000	87,0	2.802.500.293	2.053.750.000	73,3
5.1.6	Belanja Bagi Hsl. Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.754.472.000	1.754.472.000	-	1.787.241.782	1.742.500.000	-
5.1.7	Belanja Bantuan Keu. Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	406.351.312.231	405.854.264.531	99,88	376.747.407.160	375.794.960.536	99,75	320.006.024.500	317.968.973.096	99,4	216.402.853.190	214.508.371.916	99,1	86.201.894.459	65.492.145.018	76,0	48.237.591.777	46.177.043.702	95,7
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	10.224.000	0,68	2.500.000.000	12.512.000	0,50	1.000.000.000	734.156.026	73,4	500.000.000	241.750.000	48,4	500.000.000	-	-	1.500.000.000	581.422.281	38,8
5.2	Belanja Langsung	903.607.796.915	8,76684E+11	97,02	981.855.037.247	918.022.072.543	93,50	820.048.035.616	748.916.909.315	91,3	751.029.307.410	649.340.477.249	86,5	1.031.323.098.818	944.693.543.804	91,6	532.035.775.300	493.020.646.195	92,7
5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	38.611.846.900	-	-	-	-	-	-	-	-	450.242.949.622	431.717.602.972	-	18.110.653.200	15.738.937.950	-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	611.425.016.275	611.425.016.275	100,00	535.869.638.425	525.318.599.098	98,03	452.145.746.250	418.172.616.191	92,5	414.454.559.313	345.142.601.459	83,3	334.932.772.442	303.396.569.836	90,6	259.348.374.513	245.812.126.983	94,8
5.2.3	Belanja Modal	265.258.661.194	265.258.661.194	100,00	407.373.551.922	392.703.473.445	96,40	367.902.289.366	330.744.293.124	89,9	336.574.748.097	304.197.875.790	90,4	246.147.376.754	209.579.370.996	85,1	254.576.747.587	231.469.581.262	90,9
Surplus / Defisit		(83.248.242.009)	16.117.796.587	(19,36)	(99.174.727.963)	(39.249.403.700)	39,58	(124.281.106.832)	(2.582.638.214)	2,1	(121.788.714.690)	28.457.894.500	(23,4)	(88.533.344.165)	47.647.608.962	(53,8)	(72.746.915.916)	26.288.366.044	(36,1)
6	Pembiayaan Daerah				-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	89.295.314.009	89295314009	100,00	122.221.799.963	121.784.005.969	99,64	161.537.222.442	159.956.768.596	99,0	127.542.472.285	136.675.269.332	107,2	94.159.190.064	94.495.190.064	100,4	76.793.987.421	71.838.987.422	93,5
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	59.295.314.009	59.295.314.009	100,00	120.721.799.963	121.202.865.127	100,40	159.537.222.442	159.387.176.123	99,9	127.442.472.285	136.675.269.332	107,2	94.159.190.064	94.159.190.064	100,0	71.793.987.421	71.793.987.422	100,0
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	1.500.000.000	581.140.842	38,74	2.000.000.000	569.592.473	28,5	100.000.000	-	-	-	336.000.000	-	5.000.000.000	45.000.000	11.111
6.1.7	Penerimaan Pembayaran ASKES	-	-					-	-		-	-		-	-		-	-	

NO	URAIAN	TAHUN																	
		TARGET 2018	REALISASI 2018	%	TARGET 2017	REALISASI 2017	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2014	REALISASI 2014	%	TARGET 2013	REALISASI 2013	%
6.1.8	Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga	6.047.072.000	5.889.255.300	97,39				-	-		-	-		-	-		-	-	
6.1.9	Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	-	-					-	-		-	-		-	-		-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.047.072.000	5.889.255.300	97,39	23.047.072.000	23.245.864.760	100,86	37.256.115.610	36.652.330.420	98,4	5.753.757.595	5.595.941.390	97,3	5.625.845.899	5.467.529.694	97,2	4.047.071.505	3.968.163.402	98,1
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	59.295.314.009	59.295.314.009	100,00	15.000.000.000	15	0,00	15.000.000.000	15.000.000.000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	30.000.000.000	30.000.000.000	100,00	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00	16.038.190.000	16.038.188.960	100,0	2.500.000.000	2.500.000.000	100,0	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	3.047.072.000	2.889.255.300	-	3.047.071.505	2.889.255.300	94,8	3.047.071.505	3.395.755.300	111,4	3.047.071.505	2.968.163.402	97,4
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	3.047.072.000	2.889.255.300	94,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5	Pembayaran Utang Belanja	-	-	-	-	-	-	3.170.853.610	2.724.886.160	-	206.686.090	206.686.090	100,0	1.578.774.394	1.071.774.394	67,9	-	-	-
6.2.6	Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.7	Dana Bergulir	-	-					-	-		-	-		-	-		-	-	
6.2.8	Piutang Pihak Ketiga	6.047.072.000	5.889.255.300	97,39				-	-		-	-		-	-		-	-	
Pembiayaan Netto		83.248.242.009	83.406.058.709	100,19	99.174.727.963	98.538.141.209	99,36	124.281.106.832	123.304.438.176	99,2	121.788.714.690	131.079.327.942	107,6	88.533.344.165	89.027.660.370	100,6	72.746.915.916	67.870.824.019	93,3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan (SILPA)	-	99.523.855.296	-	-	59.288.737.509	-	-	120.721.799.963	-	-	159.537.222.442	-	-	136.675.269.332	-	-	94.159.190.064	-

3.2.3 Penghargaan Yang Diterima

Penghargaan yang diterima pada tahun 2018 antara lain:

1. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bone oleh PT.TASPEN atas Penyetoran selisih iuran JKK JKM Priode Juli-Desember Tahun 2017.
2. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bone oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebagai Tanda Terima Kasih atas Penyetoran iuran Wajib PNS Daerah dan Iuran Wajib Pemda Triwulan Ke IV Tahun 2018.
3. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bone oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebagai Tanda Terima Kasih atas Penyetoran iuran Wajib PNS Daerah, Iuran Wajib Pemda dan PBI APBD.

3.2.4 Permasalahan dan Solusi

Walaupun pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 tercapai, berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang kinerja pelayanan BPKAD yang berdaya guna dan berhasil guna, secara spesifik identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang anggotanya termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil koordinasi perencanaan keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRD. Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah adalah:

- a. Proses pembahasan RAPBD Kabupaten Bone pada DPRD masih didominasi pendekatan politis, sehingga pembahasan rancangan APBD seringkali berlangsung alot, yang mengakibatkan penetapan APBD juga berlangsung lama;
- b. Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang dengan perencanaan belanja pada program dan kegiatan di masing-masing OPD, sehingga mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang kurang mendapat

dukungan dari segi pendanaan;

- c. Adanya OPD yang belum mengikuti perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan RKA, sehingga masih sering diperoleh rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi BPKD Provinsi atas RAPBD Kabupaten;
- d. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut;
- e. Proporsi pengalokasian belanja pembangunan lebih rendah dibandingkan belanja aparatur;
- f. Belum terealisasinya pengalokasian belanja modal minimum 30% terhadap APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya fungsi perencanaan dan distribusi dalam penyusunan APBD*.

2. Perbendaharaan Keuangan Daerah

Pengelolaan administrasi perbendaharaan yang tertib dan cepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Tertib dapat diartikan bahwa proses administrasi perbendaharaan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan SPM, SP2D harus memenuhi syarat kelengkapan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat berjalan dengan lancar

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perbendaharaan Keuangan Daerah, adalah:

- a. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, dalam proses, perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya;
- b. Pengelolaan gaji yang tidak cermat dalam proses pencairan, sering terjadi kelebihan bayar (puna bakti yang menerima gaji karena tidak dilaporkan ke BPKAD), aplikasi PT.Taspen yang digunakan belum mengaktifkan Betas Usia Pensiun secara otomatis untuk mendeteksi PNS yang memasuki masa purna bakti.
- c. Belum sepenuhnya penerapan Transaksi Non Tunai (TNT), yang berhadapan dengan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka

Perbendaharaan Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya pengelolaan belanja daerah*

3. Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah

Raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Bone selama 3 kali sejak tahun 2015-2018 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Bone.

Selain itu, Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah adalah;

- a. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat. Kurang bisa diimbangi dengan kecepatan adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul kendala yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih / tidak sinkron antara satu peraturan dengan yang lain, dan adanya multitafsir terhadap satu peraturan perundang-undangan. Misalnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun menggunakan SAP berbasis akrual. Penerapan laporan keuangan berbasis akrual belum diimbangi dengan sumber daya aparatur yang memadai.
- b. Pembinaan kepada OPD dalam hal pelaporan keuangan dan aset harus terus ditingkatkan, khususnya dalam penerapan *acrual basic* agar tidak terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban, sehingga menyajikan laporan keuangan dan aset masing- masing OPD yang akuntabel dan tepat waktu dalam penyajiannya;
- c. Percepatan tindak lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang perlu ditingkatkan;
- d. Ketersediaan Dokumen SPJ SKPD yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas, dan penatausahaan keuangan pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang belum tertib sepenuhnya.

- e. Penatausahaan asset yang belum tertib sepenuhnya, sekitar 70% aset pemda belum tersertifikat dan ada beberapa yang belum teridentifikasi serta beberapa aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, dan Tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko, kios dan lods Pasar Sentral Palakka Watampone belum didukung dengan bukti perikatan, dan pembelian yang telah lunas belum diproses bukti kepemilikannya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.
- 2) Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah.

4. Layanan Administrasi Perkantoran

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake holder lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka Layanan Administrasi Perkantoran, adalah:

- a. Standar Operasional Prosedur untuk masing- masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi;
- b. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya adalah salah satu cara bagi aparatur untuk terus memperbaharui sekaligus meningkatkan wawasan/kemampuan, baik dalam hal pengelolaan keuangan, maupun administrasi umum dan pemerintahan lainnya. Untuk itu, ke depan diharapkan PNS lingkup BPKAD dapat secara rutin ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya aparatur, baik PNS pria maupun perempuan, golongan II, III hingga golongan IV dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, hingga muaranya adalah pemerataan kualitas SDM lingkup BPKAD yang memahami dan mampu menjalankan tupoksi yang melekat pada BPKAD secara professional;

- c. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKAD Kabupaten Bone yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusi Aparatur lingkup BPKAD*

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen Aset Daerah;
2. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis *accrual*;
3. Peningkatan pemanfaatan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem pengelolaan barang milik daerah (E-Planning, E-Budgeting, dan SimBMD);
4. Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) dalam pengelolaan Kas Daerah yang berhadapan dengan percepatan realisasi APBD dan tertib administrasi; dan
5. Peningkatan dan modernisasi pelayanan berbasis mutu, melalui Inovasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone juga menjadi makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA BPKAD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2018 adalah ***Sangat Baik***, karena terdapat satu indikator memenuhi kriteria ***Sangat Baik*** dan dua indikator memenuhi ***Baik***.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk pelayanan yang memperoleh beberapa penghargaan oleh Pemerintah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone ke depan. Dalam meningkatkan layanan pengelolaan keuangan, penatausahaan dan pengamanan aset daerah, dan peningkatan SDM Aparatur. Bagi instansi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, serta pelayanan ditahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 merupakan laporan tahunan dan sekaligus menjadi laporan masa akhir Rencana Strategis BPKAD Kab. Bone priode tahun 2013-2018. Berdasarkan masalah dan isu strategis untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance serta meningkatkan kinerja BPKAD Kab. Bone dimasa akan datang, perlu dirumuskan bersama indikator sasaran yang menjadi tolak ukur kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD Kab. Bone priode tahun 2019-2023.

Watampone, 25 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE



Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip :19650915 198603 1 018



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bone per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 42.A/LHP/XIX.MKS/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 42.B/LHP/XIX.MKS/05/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Bone terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone yaitu adanya:

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Belum Dikelola Secara Cermat;
2. Kelebihan Pembayaran atas Tunjangan Komunikasi Intensif, Dana Operasional dan Tunjangan Reses Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone;
3. Belanja Honorarium dan Jasa/Upah Kerja pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp110.627.564,30; dan
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Belum Disampaikan kepada Bupati Bone Sebesar Rp1.579.401.444,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bone antara lain agar menginstruksikan kepada:

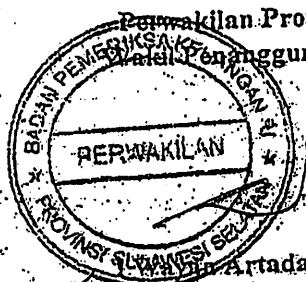
1. Kepala BPKAD lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM dalam rangka validasi data kepegawaian untuk diakomodir dalam *database* SIMGaji;
2. Kepala BKPSDM lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya;
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BKPSDM melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Kepala Sub Bidang Pengelola Gaji BPKAD mengenai *database* pegawai;
4. Sekretaris DPRD untuk memerintahkan kepada Bendahara DPRD untuk melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sesuai dengan ketentuan;
5. TAPD agar dapat melakukan verifikasi atas usulan belanja honorarium dalam RKA SKPD agar mengacu sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kesbangpol untuk lebih cermat dalam mengusulkan belanja honorarium RKA SKPD, serta memerintahkan pegawai-pegawai yang bersangkutan untuk mengembalikan selisih honorarium yang tumpang tindih/ganda dan selisih honorarium yang tidak mengacu sesuai SBU ke Kas Daerah;
7. Kepala Dinas Perkimtan untuk memerintahkan PPK agar Penyedia Jasa CV AJR melakukan penyeteroran ke Kas Daerah atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp20.291.084,30; dan
8. Kepala Desa terkait untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 25 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Pangung Jawab Pemeriksaan,



Artadana, A. S., S.E., Ak., CA
Akuntan Register Negara No. RNA-10720

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. A. P. Pettarani Telepon (0411) 854977 - 854988, Fax. (0411) 854995 Makassar, 90222

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2017**

Berdasarkan pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaannya ke Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan hal tersebut pada hari ini Senin, tanggal 28 Mei 2018 bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Widiyatmantoro
Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Nama : Ir. H. Andi Bakti Haruni
Jabatan : Pj. Bupati Bone
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017 dan Pihak Kedua telah menerima Hasil Pemeriksaan tersebut.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua,

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
Pj. Bupati,


IR. H. ANDI BAKTI HARUNI

Pihak Pertama,

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULSEL**
Kepala,


DRS. WIDIYATMANTORO



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Andi Pangerang Pettarani Telp. (0411) 854977 Fax. (0411) 854995 Makassar 90222

Makassar, 25 Mei 2018

Nomor : 200/S/XIX.MKS/05/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bone Tahun Anggaran 2017

Kepada Yth.
Bupati Bone
di
Watampone

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku;

2. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Modal TA 2017 pada Tiga SKPD sebesar Rp31.805.850.500,00;

3. Penatausahaan Utang Belanja Tidak Tertib;

4. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Memadai;

5. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Belum Dikelola Secara Cermat; dan

6. Belanja Honorarium dan Jasa/Upah Kerja pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan kepada Bupati Bone antara lain agar:

1. Sekretaris Daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari SKPD terkait agar lebih optimal dalam mengevaluasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Kepala SKPD terkait agar lebih cermat dalam menyusun anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat;

3. Kepala Bidang Akuntansi agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) verifikasi utang belanja dari SKPD sebelum disajikan sebagai saldo utang belanja pada Neraca LKPD;

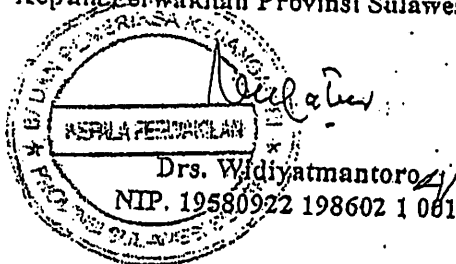
4. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah lebih optimal dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait pengelolaan dan penyajian aset tetap milik pemerintah daerah;
5. Kepala BPKAD lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM dalam rangka validasi data kepegawaian untuk diakomodir dalam database SIMGaji; dan
6. TAPD agar dapat melakukan verifikasi atas usulan belanja honorarium dalam RKA SKPD agar mengacu sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 42.A/LHP/XIX.MKS/05/2018; Nomor 42.B/LHP/XIX.MKS/05/2018; dan Nomor 42.C/LHP/XIX.MKS/05/2018 masing-masing bertanggal 25 Mei 2018.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atas penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Bone, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan



Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bone;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bone.



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Sebagai Tanda Terima Kasih atas Penyetoran
Iuran Wajib PNS Daerah dan Iuran Wajib Pemda
Triwulan Ke IV Tahun 2018

Watampone, 18 Desember 2018

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Watampone



[Signature]
Hartono Purba, S.T.



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Sebagai Tanda Terima Kasih atas Penyetoran Iuran Wajib
PNS Daerah, Pemda dan PBI APBD
Tahun 2018

Watampone, 24 Oktober 2018

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Watampone

Hartono Purba, S.T.





PEMERINTAH KABUPATEN BONE

KOMITMEN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Bone sebagai laboratorium inovasi daerah, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Andi Fajaruddin, MM
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bone
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si
Jabatan : Bupati Bone
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berkomitmen akan melaksanakan inovasi :

1. **Sistem Informasi Taro Ada Taro Gau** (Aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan dan pelaporan aset OPD)
2. **Si Kareba Bunda** (Aplikasi yang berbasis digital yang menampilkan pelaksanaan proses pencairan dana pada BPKAD)

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian inovasi menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian inovasi dari komitmen ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 6 Februari 2018

Pihak Kedua,

DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si

Pihak Pertama,

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM
NIP. 19650915 198603 1 018